



Subordinasi Perempuan (Studi Subordinasi Perempuan Dalam Keluarga Pemuka Agama Islam)

Arintias Novitasari

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Airlangga

corresponding author: Arintias.novitasari-2023@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji subordinasi perempuan dalam konteks keluarga pemuka agama Islam dengan menerapkan teori patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby sebagai landasan analisis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam dapat dipahami sebagai akibat dari dominasi laki-laki dalam pembagian tugas di rumah tangga yang tidak seimbang. Dalam struktur ini, laki-laki memiliki kontrol penuh atas pengambilan keputusan, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang mengikuti atau melaksanakan keputusan tersebut. Seringkali, perspektif agama digunakan untuk membenarkan struktur hierarki ini, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan keluarga. Selain itu, norma-norma agama dan kontrol dari laki-laki dalam keluarga (baik suami maupun ayah) sering kali mengatur seksualitas perempuan, yang dihubungkan dengan kehormatan keluarga, sehingga membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan terkait seksual dan reproduktif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga Pemuka Agama Islam dapat terlihat dalam berbagai aturan mengenai kesucian pernikahan dan peran reproduktif yang ditekankan oleh ajaran agama. Lebih jauh, kontrol yang dilakukan oleh agama dalam budaya sering kali memperkuat posisi subordinasi perempuan, menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam merupakan hasil dari interaksi antara faktor sosial, budaya, dan agama yang saling memperkuat patriarki.

Kata kunci: Subordinasi Perempuan, Keluarga Pemuka Agama, Kesetaraan Gender,

Abstract

This research examines women's subordination in the context of Islamic religious leaders' families by applying the patriarchy theory proposed by Sylvia Walby as the basis of analysis. The findings of this study show that women's subordination in the families of Islamic religious leaders can be understood as a result of male dominance in the unequal division of tasks in the household. In this structure, men have full control over decision-making, while women are often perceived as those who follow or implement these decisions. Often, religious perspectives are used to justify this hierarchical structure, where men are considered to have God-given authority to organize family life. In addition, religious norms and control from men in the family (both husbands and fathers) often regulate women's sexuality, which is associated with family honor, thus limiting women's freedom to make sexual and reproductive choices. This research also highlights that the subordination of women in the families of Islamic religious leaders can be seen in the various rules regarding the sanctity of marriage and reproductive roles emphasized by religious teachings. Furthermore, the control exercised by religion in the culture often reinforces women's subordinate position, placing them in an inferior position to men. The conclusion of this study is that women's subordination in the families of Islamic religious leaders is the result of the interaction between social, cultural and religious factors that mutually reinforce patriarchy.

Key words: Women's Subordination, Family Of Religious Leaders, Gender Equality



PENDAHULUAN

Subordinasi Perempuan adalah pandangan yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang inferior dibandingkan laki-laki, baik dalam kedudukan, fungsi, maupun peran, (Imam S, 2015). Dalam keluarga religious, Perempuan sering dibatasi pada peran domestic dan tidak dilibatkan dalam pengambilan Keputusan penting. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman agama yang menganggap Perempuan sebagai “Pendukung” dan laki-laki sebagai “pemimpin” uang mana mengarah pada ketidakadilan gender dan membatasi partisipasi Perempuan dalam kehidupan public maupun domestic (Fakih M, 2013). Meskipun Islam mengajarkan kesetaraan gender praktik dikeluarga pemuka agama Islam sering dipengaruhi budaya dan struktur sosial, menghasilkan kontradiksi antara nilai-nilai agama yang adil dan praktik gender yang subordinative (Mahfud Choirul, 2020). Umumnya masyarakat Indonesia sangat memegang teguh nilai-nilai agama, yang tercermin pula dalam pembentukan struktur keluarga. Seorang pemuka agama atau tokoh agama dalam sebuah masyarakat sangat dihormati dan dijadikan teladan. Sebagai tokoh agama yang di hormati serta disegani masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk norma dan praktik keagamaan, termasuk dalam hubungan gender di dalam sebuah keluarga. Namun tidak jarang ditemukan praktik subordinasi Perempuan dalam keluarga pemuka agama yang mendapatkan legitimasi melalui interpretasi terhadap jajaran agama. Keluarga adalah konstelasi hubungan unik yang secara hukum diartikan sebagai kelompok dengan ikatan darah, pernikahan atau adopsi. Menurut Galvin dan Brommel, keluarga adalah jaringan individu yang saling hidup bersama dalam waktu yang panjang, terhubung melalui ikatan pernikahan, darah atau komitmen, baik legal maupun tidak, dengan pandangan sebagai satu kesatuan yang berbagi harapan masa depan. Presepektif ini melihat keluarga sebagai sistem yang menekankan hubungan antar anggota, bukan sekedar individu terpisah (Prasanti & El Karimah, 2018).

Keluarga merupakan sebuah institusi yang luhur, yang dibangun atas dasar cinta dan ikatan pernikahan yang sah dengan tujuan untuk mendapat ridha Allah Swt, serta untuk memiliki keturunan dan mempererat hubungan antara keluarga suami istri. Rice dan Tunker (1986). Subordinasi perempuan dalam konteks keluarga pemuka agama Islam merupakan isu yang kompleks dan mendalam, yang mencerminkan interaksi antara norma-norma agama, budaya, dan struktur sosial. Dalam banyak masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh tradisi keagamaan yang kuat, perempuan sering kali mengalami subordinasi yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Keluarga pemuka agama, sebagai representasi dari otoritas dan nilai-nilai keagamaan, sering kali menjadi cerminan dari bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks Islam, terdapat berbagai interpretasi mengenai peran dan posisi perempuan. Beberapa pemuka agama menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pendidik dan pengasuh dalam keluarga, sementara yang lain mungkin menekankan batasan-batasan yang lebih ketat terhadap peran sosial dan ekonomi perempuan. Hal ini menciptakan dinamika yang unik dalam keluarga pemuka agama, di mana perempuan mungkin terjebak antara tuntutan tradisi dan harapan modernitas. Bentuk subordinasi yang dialami perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam dapat mencakup pembatasan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat (Hossain, 2017; Rahman, 2018).

Dalam banyak kasus, perempuan diharapkan untuk mematuhi norma-norma tradisional yang membatasi peran mereka di luar rumah, walaupun perempuan memiliki potensi kemampuan yang setara dengan laki-laki. Dampak dari subordinasi ini terhadap kehidupan perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami subordinasi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih buruk, kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan peluang kerja, serta mengalami kesulitan dalam



membangun jaringan sosial yang kuat (Ali, 2020; Zainuddin, 2021). Selain itu, subordinasi dapat mengakibatkan hilangnya identitas dan otonomi perempuan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Perempuan yang terjebak dalam struktur subordinasi ini sering kali merasa terasing dan tidak berdaya, yang dapat mengarah pada perasaan depresi dan kecemasan (Khan, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bentuk-bentuk subordinasi yang dialami perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu gender dalam konteks agama dan budaya, serta memberikan saran-saran untuk mendorong kesetaraan gender di dalam keluarga para pemuka Agama Islam.

METODE

Pada penelitian “Subordinasi Perempuan (Studi Subordinasi Perempuan dalam Keluarga Pemuka Agama)” menggunakan jenis penelitian Kualitatif, pemahaman mendalam mengenai tulisan, ucapan, atau perilaku subjek penelitian terkait suatu masalah. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi tertentu dan menggunakan kerangka interpretasi yang membimbing atau memengaruhi studi untuk mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu isu sosial secara lebih mendalam (JASMINE, 2014). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan proses pengumpulan, penelaahan, analisis, dan pengolahan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini mencakup pencarian literatur yang sistematis, baik dari jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen – dokumen resmi, serta sumber digital lainnya. Proses tersebut diikuti dengan membaca secara kritis, mencatat informasi penting, dan menyintesis temuan-temuan yang diperoleh untuk dijadikan dasar dalam pengembangan argumen dan pembahasan ilmiah. Studi literatur ini berperan penting dalam membangun kerangka teoretis serta memberikan landasan empiris yang kuat untuk penelitian, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lebih lanjut (Royani & L, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Sub pertama adalah bentuk-bentuk dari subordinasi perempuan yaitu adanya Marginalisasi, Subordinasi dan Multy borden dan sub yang kedua adalah dampak dari subordinasi, subordinasi pada kesehatan mental, dan Analisis Subordinasi Perempuan Studi Subordinasi Perempuan dalam Keluarga Pemuka Agama Islam oleh teori patriarki Sylvia Walby. Maka dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Bentuk Subordinasi pada perempuan dalam keluarga pemuka agama

Marginalisasi

Marginalisasi perempuan dalam keluarga Islam mengacu pada kondisi di mana perempuan mengalami penurunan peran, hak, serta partisipasi dalam kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh norma-norma Islam. Situasi ini sering terjadi melalui praktik-praktik seperti pernikahan anak (nikah di bawah umur) dan pernikahan tanpa pencatatan resmi (nikah sirri), yang sering kali membuat perempuan berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Pada kasus pernikahan anak, meskipun diizinkan oleh syariat Islam, praktik ini tidak selalu cocok dengan situasi semua perempuan dan dapat menimbulkan risiko kerentanan, baik dari sisi hukum maupun sosial. Demikian pula, nikah sirri, meski sah secara syariat, tetapi tidak diakui secara hukum negara, dapat menciptakan ketidakjelasan status hukum bagi pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Muhammad Ahmad Rahmatullah, n.d.). Selain itu, di sejumlah komunitas Muslim, penafsiran konservatif terhadap teks agama sering dimanfaatkan untuk membatasi peran perempuan, termasuk di bidang politik, dengan lebih menonjolkan peran mereka dalam ranah domestik dan mengaitkan kepemimpinan dengan laki-laki. Pendekatan ini diperkuat oleh budaya patriarki yang telah lama menjadi bagian dominan dalam banyak masyarakat Muslim (Fikri, 2024).

Subordinasi

Menurut Shiva (1997) dan Mosse (1996), mengungkapkan bahwa berbagai program pembangunan di Asia justru meminggirkan dan memiskinkan perempuan, misalnya, revolusi hijau yang memperkenalkan padi unggul dengan metode panen sabit menghilangkan peran perempuan sebagai buruh panen, pekerjaan yang kemudian didominasi oleh laki-laki dengan upah yang lebih tinggi, Subordinasi perempuan dalam budaya patriarki membuat mereka dirugikan secara sosial, ekonomi dan politik. Keterbatasan ekonomi juga memengaruhi kemampuan perempuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, baik di rumah tangga atau masyarakat. Di Indonesia meskipun perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan rasio 4:1, namun sektor ekonomi tetap saja didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sering dipandang sebagai pelengkap dengan beban kerja lebih berat. Namun pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki (Dan, 2015).

Subordinasi adalah tindakan masyarakat yang memposisikan perempuan pada tempat yang lebih inferior dibandingkan laki-laki. Dalam masyarakat, peran gender sering kali dipisahkan, dimana perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan reproduksi, sementara laki-laki lebih berfokus pada urusan publik dan dunia kerja. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki memiliki keunggulan yang diwariskan secara turun-temurun, menciptakan prasangka gender yang memengaruhi hubungan laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering memegang posisi dominan (superordinat) di berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak inferior, yang dilegitimasi oleh lembaga-lembaga patriarki untuk mempertahankan dominasi tersebut.

Subordinasi yang dilanggengkan oleh ideologi patriarki menciptakan ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan ini juga berdampak pada hubungan sesama perempuan, mendorong mereka untuk menginternalisasi citra inferior dan mengambil posisi subordinat. Fakhri (1996) menyatakan bahwa perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial melahirkan sifat dan stereotip yang dianggap sebagai ketentuan alami atau ilahi, sehingga memperkuat subordinasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan perempuan bukanlah melawan laki-laki, melainkan melawan struktur ketidakadilan untuk menciptakan hubungan yang setara dan lebih baik di berbagai bidang kehidupan (Akib & Ibrahim, 2016).

Multy Borden (Beban Ganda)

Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work-Family Conflict/WFC):

Penelitian ini menemukan bahwa akademisi Muslimah di Malaysia mengalami konflik antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Beberapa penyebab utama WFC adalah: Jam kerja yang panjang: Menuntut waktu lebih banyak di luar rumah. Jadwal kerja yang tidak fleksibel: Terkadang menyulitkan untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga.

Beban kerja berlebih: Akademisi menghadapi tekanan pekerjaan seperti mengajar, penelitian, dan tugas administratif. Pekerjaan rumah tangga: Menjadi tantangan karena harus dilakukan sendiri atau dibantu anggota keluarga pada akhir pekan. Masalah anak-anak: Mengurus anak yang sakit, mengantar ke sekolah, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi menjadi perhatian utama. 2. Dampak WFC: WFC menyebabkan penurunan produktivitas, moral yang rendah, absensi yang tinggi, serta penurunan kepuasan kerja dan keluarga (Achour et al., 2014).

Beban yang berlebihan ini dasarnya cenderung mengarah pada sektor public dan domestic. Pada era digital, perempuan sudah mulai merambah ke ranah public karena dampak meningkatnya pendidikan pada sektor perempuan, perempuan menginginkan adanya perubahan berubah mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa untuk berdiri dikakinya sendiri, namun ada penghambat pada budaya yang ada di wilayah perempuan tersebut sehingga membuat perempuan terhambat (Hidayati, 2016).

Menurut Skolnick dalam Budiman (1985), perbedaan psikologis antara pria dan wanita dapat dipahami melalui dua pembedaan utama, yaitu teori nature dan teori nurture. Para pendukung teori nature berpendapat bahwa perbedaan psikologis tersebut disebabkan oleh

faktor biologis yang terwariskan pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, teori nurture berargumen bahwa perbedaan tersebut muncul sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Sebagai upaya menengahi kedua pandangan tersebut, teori equilibrium berpendapat bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor biologis dan pengaruh lingkungan yang saling mempengaruhi.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan biasanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pekerja domestik sering dianggap sebagai aktivitas reproduksi tanpa nilai ekonomis. Sapri et al. (1997) menyebutkan bahwa masyarakat memerlukan kerja produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kerja reproduksi untuk menjaga keberlanjutan sosial. Kerja reproduksi mencakup aktivitas rumah tangga dan kegiatan masyarakat yang mendukung struktur sosial. Masyarakat sulit fokus pada kerja produktif bila kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Saptari juga membedakan reproduksi biologis yaitu kelahiran anak dengan reproduksi sosial yang meliputi pengasuhan, sosialisasi tenaga kerja serta pelestarian hubungan produksi dan struktur sosial (Hidayati, 2016).

Berdasarkan pembagian kerja tersebut, perempuan yang bekerja sering kali menghadapi beban ganda, bahkan beban tiga lapis (*triple burden*). Sebagai ilustrasi, seorang perempuan yang aktif bekerja di ranah publik dan berhasil mencapai posisi puncak dalam kariernya tetap diharapkan memikul tanggung jawab penuh atas tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, memasak, merapikan rumah, hingga merawat anak. Dalam budaya masyarakat kita, keberhasilan perempuan seringkali diukur melalui pencapaian "Sukses dalam Karier dan Keluarga" apabila perempuan unggul dalam pekerjaannya tetapi dianggap gagal memenuhi peran dalam keluarga, maka ia akan mendapat julukan sebagai perempuan yang tidak benar-benar berhasil (Hidayati, 2016).

Dampak Subordinasi pada Kesehatan Mental Perempuan

Dampak subordinasi pada perempuan cenderung beragam, ada beberapa dampak subordinasi pada kesehatan mental, Pertama menimbulkan resiko depresi dan gangguan kecemasan perempuan yang mengalami kekerasan yang berhubungan dengan isu-isu gender, seperti kekerasan domestik, meningkatkan risiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan pada korban. Kondisi ini diperparah dengan stigma sosial yang sering kali menghalangi perempuan untuk mencari bantuan medis. Lalu yang kedua adanya Stigma Sosial dan Isolasi, stigma yang melekat pada kekerasan berbasis gender membuat banyak perempuan merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial yang berkontribusi terhadap buruknya kesehatan mental. Yang ketiga minimnya ada dukungan sosial, perempuan seringkali kurang mendapat dukungan sosial yang memadai, baik dari masyarakat maupun keluarga, untuk menghadapi trauma akibat subordinasi dan kekerasan. Kekurangan ini sangat menghambat pemulihan mental mereka. Keempat kurangnya akses kelayakan kesehatan mental dan ketakutan akses akan penilaian masyarakat menyebabkan perempuan terjebak pada situasi yang sulit untuk diatasi. Hal ini menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit dihentikan tanpa adanya dukungan yang cukup. Dan yang kelima Kesenjangan akses layanan kesehatan mental, beberapa jurnal mencatat bahwa infrastruktur layanan kesehatan, termasuk untuk kesehatan mental, sering kali tidak memadai terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini semakin membatasi akses perempuan untuk mendapat bantuan terutama pada kesehatan mental. Dan yang keenam faktor sosial budaya, norma-norma patriarki dan diskriminasi berbasis gender seringkali membatasi otonomi perempuan dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk mendapatkan perawatan mental yang mereka butuhkan (No et al., 2024). Lalu ketujuh ketidakadilan peran gender, Subordinasi memperkuat ketidakadilan dengan memposisikan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam budaya patriarkal, perempuan sering dianggap hanya berperan dalam ranah domestik, sementara laki-laki mendominasi ranah publik. hal ini tidak hanya membatasi peluang perempuan untuk berkembang tetapi juga menciptakan tekanan emosional akibat peran ganda yang harus mereka jalankan di ranah domestik dan publik (Karwati, 2021). Semua faktor menyerosoti perlunya



kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender guna mengurangi dampak subordinasi terhadap kesehatan mental perempuan.

Subordinasi Perempuan dalam keluarga Pemuka Agama berdasarkan analisis teori Patriarki Sylvia Walby.

Pada teori ini menjelaskan mengenai subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama islam. Walby menyatakan bahwa keluarga adalah salah satu arena utama dimana patriarki beroperasi, terutama melalui kontrol atas kerja domestik. Dalam keluarga pemuka agama islam, peran perempuan sering kali dibatasi pada lingkup domestik, seperti hanya dikhususkan untuk mengurus rumah tangga saja, merawat anak dan mendukung suami. Lalu sering kali agama memperkuat pembagian peran ini, dimana peran "Tradisional" perempuan dipertahankan melalui ajaran agama yang menekankan pentingnya kepatuhan perempuan kepada suami sebagai kepala keluarga. Subordinasi perempuan dalam keluarga religius dapat dijelaskan sebagai hasil dari kontrol seorang laki-laki terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga yang tidak setara.

Walby juga menekankan bahwa laki-laki memiliki kendali penuh atas keputusan dalam keluarga, terutama dalam konteks keluarga pemuka agama islam, karena banyak keluarga religius seringkali ditempatkan sebagai pemimpin spiritual dan pengambilan keputusan utama, sedangkan perempuan dipandang sebagai pengikut atau pelaksana keputusan. Prespective agama sering kali digunakan untuk membenarkan hirarki ini, ketika laki-laki dianggap memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan keluarga, sehingga perempuan berada dalam posisi subordinat. Selain itu dalam keluarga religius, seksualitas perempuan sering kali diatur secara ketat, karena dalam norma agama maupun oleh laki-laki dalam keluarga (Suami atau Ayah) seksualitas seorang perempuan sering dikaitkan dengan kehormatan keluarga, dan kontrol penuh atas tubuh perempuan sehingga ini membatasi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan seksual atau reproduktif.

Subordinasi tercermin dalam atauran-aturan tentang kesucian pernikahan dan peran reproduktif yang ditekankan agama. Selanjutnya Walby membedakan antara patriarki privat dan patriarki publik. Dalam keluarga religius, patriarki privat sangat jelas terlihat karena perempuan ditempatkan dalam peran subordinat secara domestik. Lalu kontrol agama pada budaya, aspek budaya religius sering kali memperkuat peran subordinasi perempuan dengan menempatkan mereka dalam peran yang lebih rendah dari pada laki-laki, ajaran agama menekankan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan harus taat pada suami stagmen ini memperkuat subordinasi. Dan walby menyebut bahwa kekerasan juga merupakan satu bentuk kontrol patriarki, dalam keluarga religius kekerasan terhadap perempuan bisa digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Beberapa tradisi religius digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan perempuan agar taat pada norma-norma religius patriarki(Segal & Walby, 1991).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam merupakan fenomena yang kompleks, yang dipengaruhi oleh interaksi antara norma-norma agama, budaya, dan struktur sosial. Temuan menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengambilan keputusan menciptakan ketidaksetaraan gender yang signifikan. Perspektif agama sering kali digunakan untuk membenarkan hierarki ini, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan, sementara perempuan terjebak dalam peran domestik yang terbatas. Selain itu, kontrol terhadap seksualitas perempuan dan norma-norma yang mengatur peran reproduktif semakin memperkuat posisi subordinasi mereka. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa subordinasi perempuan dalam konteks ini adalah hasil dari kombinasi faktor sosial, budaya, dan agama yang saling memperkuat patriarki terbukti benar. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian dan praktik di masyarakat. Pertama, penting untuk mengembangkan program pendidikan yang menekankan kesetaraan gender dan

hak-hak perempuan, terutama di kalangan pemuka agama dan masyarakat umum, guna mengubah pandangan tradisional yang mendukung subordinasi perempuan. Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dalam keluarga pemuka agama, termasuk studi kasus di berbagai komunitas untuk memahami variasi praktik dan interpretasi agama.

Advokasi untuk kebijakan yang responsif terhadap isu gender juga sangat penting, termasuk perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan peningkatan akses layanan kesehatan mental. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan perlu didorong untuk membantu mereka mencapai kemandirian finansial dan memperbaiki posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Terakhir, dialog antar agama dapat menjadi langkah efektif untuk membahas interpretasi yang lebih progresif terhadap ajaran agama yang mendukung kesetaraan gender, sehingga praktik subordinasi dapat berkurang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achour, M., Grine, F., & Roslan Mohd Nor, M. (2014). Work–family conflict and coping strategies: Qualitative study of Muslim female academicians in Malaysia. *Mental Health, Religion and Culture*, 17(10), 1002–1014. <https://doi.org/10.1080/13674676.2014.994201>
- Akib, I., & Ibrahim, M. (2016). Subordinasi Anak Perempuan dalam Keluarga. *Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier*, III(1), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- Dan, S. P. (2015). *Subordinasi perempuan dan implikasinya terhadap rumah tangga*. 15, 143–166.
- Fikri, S. (2024). *Islam dan Peran Politik Wanita : Diskursus antara Marginalisasi dan Pengakuan*. 10(2), 430–441.
- Hidayati, N. (2016). BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>
- JASMINE, K. (2014). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Muhammad Ahmad Rahmatullah, N. R. (n.d.). *MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DIBAWA USIA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)*.
- No, V., Desember, J., Dan, H., Kesehatan, K., Alamsyah, Z., & Febri, R. (2024). *Dampak Kesenjangan Gender Terhadap Kesehatan Perempuan : Tinjauan*. 2(1), 501–506.
- Prasanti, D., & El Karimah, K. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Islami di Era Digital. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 195–212. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.195-212>
- Risqi, N., Muquita, P., Hidayat, A., & Husni, V. (n.d.). *Entrepreneurship and Community Development Islamofobia Menuju Islamofilia Melalui Pariwisata Halal*. x.
- Royani, I., & L, E. N. (2020). Studi Literatur Tentang Model Pembelajaran Berbasis Teori Van Hiele Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar. *PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 93–108. <https://doi.org/10.17509/pedadidaktika.v7i2.25125>
- Segal, M. T., & Walby, S. (1991). Theorizing Patriarchy. In *Contemporary Sociology* (Vol. 20, Nomor 3, hal. 351). <https://doi.org/10.2307/2073659>